

<b>Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan</b> Dr. Saifuddin, MA & T. Alfiady S. Sos., MSP	1
<b>Hakikat Ilmu Sosial dan Implikasinya Atas Keberagaman Pendekatan Dalam Administrasi Publik</b> Laurensius P. Sayrani, S.Sos., MPA	12
<b>Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Otsus Aceh</b> Nur Hafni, S.Sos., MPA	33
<b>Etika Politik Pejabat Publik Di Indonesia</b> Bobby Rahman, S.Sos., M.Si	50
<b>Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b> Putri Murdiana, S.Sos., M.Si & Nurfatini, S.Sos., M.Si	62
<b>Rekrutmen Tenaga Honorer Katagori Dua (K2) Menjadi Pegawai Negeri Sipil</b> Hayatun Taibah	75
<b>Birokrasi Pelayanan Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor</b> Rizky Sepriil, S.IAN	120
<b>Partisipasi Anggota Legislatif Perempuan Dalam Proses Legislasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kota Lhokseumawe</b> Roma Juwita Hasibuan, S.Sos	145
<b>Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)</b> Oki Satria, S.Sos	165

**DAFTAR ISI**

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan  
*Dr. Saifuddin, MA & T. Alfiady S. Sos., MSP* ..... 1-9

Hakikat ilmu sosial dan Implikasinya atas keberagaman pendekatan dalam Administrasi public  
*Laurensius P. Sayrani, S.Sos., MPA* ..... 10-23

Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Otsus Aceh  
*Nur Hafni, S.Sos., MPA* ..... 24-37

Etika Politik Pejabat Publik Di Indonesia  
*Bobby Rahman, S.Sos., M.Si* ..... 38-49

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir  
*Putri Murdiana, S.Sos., M.Si & Nurfatini, S.Sos., M.Si* ..... 50-60

Rekrutmen Tenaga Honorer Kategori Dua (K2) Menjadi Pegawai Negeri Sipil  
*Hayatun Taibah* ..... 61-74

Birokrasi Pelayanan Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor  
*Rizky Sepriil, S.IAN* ..... 75-85

Perilaku Birokrat Pelayanan Publik  
*Ira Meutia* ..... 86-99

Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)  
*Oki Satria, S.Sos* ..... 100-114

# PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Dr. Saifuddin, MA<sup>1</sup> & T. Alfiady S. Sos., MSP<sup>2</sup>

## ABSTRAK

*Dewasa ini partisipasi menjadi kata kunci dalam bahasa sehari-hari masyarakat pembangunan, mulai daripada para petugas lapangan di desa-desa terpencil sampai para pejabat di pusat-pusat pemerintahan selalu menyebut mutlaknya partisipasi masyarakat dalam setiap gerak dan langkah pembangunan. Selama dua periode Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaan atau perkotaan sudah tidak asing di telinga kita. Implimentasi program tersebut juga mengedepankan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pada dasarnya partisipasipatif berarti ikut serta. Secara konseptual partisipasi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi proyek pembangunan. Pendekatan partisipatif sebenarnya muncul sebagai upaya mengatasi kelemahan-kelemahan dari pendekatan sentralistik. Oleh karena itu partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan mutlak diperlukan, karena masyarakatlah yang pada akhirnya akan melaksanakan program pembangunan tersebut serta bertanggungjawab melestarikan pembangunan tersebut.*

**Kata Kunci:** Partisipatif, Kemiskinan dan Pembangunan

### 1. PENDAHULUAN

Persoalan partisipasi umumnya sering diabaikan karena menurut para teoritis maupun praktisi pembangunan konvensional yang dihadapi oleh negara-negara miskin pada dasarnya adalah *technology gap* atau *resource gap*, sehingga hal yang paling penting dalam pembangunan adalah bagaimana mendatangkan keduanya dari tempat lain. Partisipasi masyarakat dimanifestasikan ke dalam bentuk ikut serta menerapkan teknologi yang diperkenalkan, bayar pajak investasi modal dan sebagainya. Padahal jika dicermati persoalan krusial yang dihadapi oleh negara dunia ketiga adalah adanya *organization gap*. Hubungan yang terjadi antara negara dengan masyarakat adalah hubungan yang bersifat satu arah dan bukan hubungan yang bersifat kerja sama dan saling mendukung. Dalam konteks inilah maka pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sangat penting untuk dilakukan.

Partisipasi masyarakat dalam sebuah program pembangunan mutlak diperlukan karena masyarakatlah yang pada akhir akan melaksanakan program pembangunan tersebut dan menikmati hasil pembangunan. Adanya penglibatan masyarakat memungkinkan

---

<sup>1</sup>Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, email: saifuddin\_my@yahoo.com

<sup>2</sup>Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh.

mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan program pembangunan. Dengan pendekatan partisipatif diharapkan partisipasi, potensi dan kreatifitas masyarakat dapat lebih tergali.

Oleh karena itu pendekatan partisipatif diharapkan berkembangnya kreatifitas yang berorientasi pada kompetensi dan tanggung jawab sosial anggota komunitas sendiri. Dengan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses maka keterampilan menganalisis dan perencanaan menjadi teralihkan kepada mereka. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka menjadi mutlak segala hal yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan ekonomi hendaklah melibatkan masyarakat. Pendekatan partisipatif sebenarnya muncul sebagai upaya mengatasi kelemahan-kelemahan dari pendekatan sentralistik. Pendekatan partisipatif menghendaki adanya sebuah pendekatan yang berbasis pada masyarakat bawah, pengakuan atas keanekaragaman lokal dan mengutamakan proses belajar.

Adanya partisipasi masyarakat juga dapat dikatakan sebagai sebuah kekuatan agar jangan sampai proses pembangunan yang dilakukan ataupun masuknya investor dari luar justru meminggirkan ekonomi masyarakat lokal. Maka dalam hal ini regulasi dari pemerintah sangat diperlukan supaya dapat memberikan keberpihakan dan perlindungan pada masyarakat lokal. Termasuk dalam konteks ini adalah kearifan lokal, tradisi lokal, potensi lokal yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai modal sosial dalam pembangunan.

## **2. PARTISIPATIF, KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN.**

Partisipasi pada dasarnya mencakup dua hal yaitu internal dan eksternal. Partisipasi secara internal berarti adanya rasa memiliki terhadap komunitas. Hal ini menyebabkan komunitas terfragmentasi dalam pelebelan pada identitas diri mereka. Sedangkan partisipasi dalam arti eksternal terkait dengan bagaimana individu melibatkan diri dengan komunitas luar. Dari pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan manifestasi tanggung jawab sosial dari individu terhadap komunitasnya sendiri maupun dengan komunitas luar. Dalam hal partisipasi ini masyarakat hendaknya perlu dilibatkan dalam setiap proses pembangunan, mulai ketika identifikasi permasalahan, proses perencanaan, pelaksanaan proyek pembangunan, evaluasi dan monitoring (Ericson, 1974).

Selama ini ada kesan bahwa seorang dikatakan sudah berpartisipasi ketika dia sudah terlibat secara fisik, seperti ikut kerja bakti, ikut menghadiri penyuluhan. Pada hal esensi yang terkandung dalam makna partisipasi sebenarnya adalah tidak sesempit itu. Inisiatif atau sumbangan saran dari warga masyarakat s sebenarnya dapat dikatakan

partisipasi. Hal ini yang kemudian konsep partisipasi hanya sekedar dimaknai sebagai keterlibatan dalam memberikan partisipasi secara materi.

Warga masyarakat yang mampu memberikan bantuan program pembangunan dalam jumlah besar berarti dia telah berpartisipasi secara aktif dalam menyukseskan jalannya pembangunan. Jika partisipasi kita artikan demikian maka kita telah menafikan partisipasi dalam bentuk non materi yang umumnya dilakukan oleh masyarakat miskin atau kelas bawah. Oleh karena itu kita sering melihat akhir-akhir ini proses pembangunan yang dilakukan cenderung menguntungkan masyarakat lapisan atas, sementara kepentingan masyarakat miskin terabaikan. Hal ini terjadi karena selama ini ada kesalahpahaman kita dalam memaknai konsep partisipasi.

Pada hakikatnya partisipasi adalah bentuk peningkatan posisi tawar menawar harga, sehingga daya tawarnya menjadi seimbang dengan pemerintah dan pihak pemilik modal. Partisipasi masyarakat juga dimaksudkan sebagai kekuatan kontrol atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga yang terjadi adalah keseimbangan antara sumberdaya lokal, kekuatan politik pemerintah dan sumber daya capital dari investor luar (Suparjan, 2003).

Sementara kemiskinan didefinisikan oleh Oscar Lewis dalam Antjok (1995) adalah penderitaan ekonomi dalam enam bentuk, yaitu; (1) sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan, (2) Pengangguran dan pengangguran tenaga skil (3) upah buruh rendah (4) tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah dalam meningkatkan status sosial (5) system keluarga bilateral dan (6) masih kuatnya perangkat nilai-nilai kelas dalam masyarakat miskin.

Penyebab kemiskinan menurut Selo Sumarjan (1977) adalah kemiskinan individual, yaitu seorang miskin karena tidak memiliki modal financial, berupa modal ketrampilan (skil), tidak memiliki jiwa usaha dan semangat untuk maju serta tidak serta mendapat kesempatan pendidikan. Kemiskinan struktural yaitu miskin yang tercipta dari system pengelolaan sumberdaya yang tidak tepat. Kemiskinan budaya tidak memiliki dorongan sosial untuk menggali sumber daya yang melimpah.

Ada tiga strategi untuk mengentaskan kemiskinan menurut Starhm (1999) yaitu; pertumbuhan melalui integrasi ke dalam perekonomian pasar bebas (2) tatanan perekonomian baru dan (3) pembangunan mandiri dengan melihat kekurangan lantai-lantai kemiskinan. Sedangkan Antjok (1995) merumuskan empat strategi pengentasan kemiskinan, yaitu; (1) kebijakan yang menguntungkan masyarakat miskin, terutama harga produk pertanian yang memadai serta peluang kerja, (2) investasi pelayanan dalam bidang

infrastruktur fisik dan sosial, (3) penyediaan teknologi bagi si miskin, (4) peran kelembagaan yang efektif, seperti NGO dan konsultan yang memberi pelayanan untuk meningkatkan produktifitas kerja dan kualitas hidup.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dalam era otonomi daerah dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu "berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri". Para pembuat kebijakan tidak melakukan kontrol yang mematikan inisiatif maupun partisipasi penduduk miskin. Disamping itu dibutuhkan pendampingan yang membantu mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat miskin dalam proses pembangunan di lingkungannya, dan penguatan kemampuan kelembagaan penduduk miskin dengan pelatihan dalam satuan kelompok-kelompok penduduk miskin bentukan mereka.

Sedangkan pembangunan sering diartikan sebagai kegiatan untuk merubah suatu kondisi kepada kondisi lebih baik yang menyangkut sikap, pola pikir dan kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat. Ia merupakan suatu proses yang menuju ke arah pertumbuhan dan '*economic progress*' yang dapat mengubah keadaan atau situasi sesuatu kawasan atau masyarakat. Contohnya kemunculan kota-kota baru, perumahan siap huni, perindustrian, gedung pencakar langit dan jembatan-jembatan besar.

Maimunah (1986) mengatakan pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berlaku secara terus menerus dan menyeluruh, meliputi tiga unsur pertama, yaitu pembangunan ekonomi, sosial dan kemanusiaan. Pembangunan sosial pula memberi peluang untuk menyediakan kemudahan sosial dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan perumahan dan kebijakan yang mana kemajuannya tidak dapat diukur dengan cepat. Sedangkan pembangunan manusia adalah hasil gabungan daripada penggabungan ekonomi dan sosial. Pembangunan manusia terlaksana secara individu atau kelompok melalui kesadaran mereka terhadap cara mana menggunakan manusia itu sebagai satu sumber yang berpotensi tinggi dan mengambil bagian aktif dalam membentuk masyarakat yang sejahtera. Jadi pembangunan adalah merangkumi pembangunan manusia dan pembangunan persekitaran fisik masyarakat tersebut.

Todaro (2000) dalam Dani Saleh (2003) berpendapat pembangunan adalah melibatkan proses penyusunan dan mengorientasikan semula sistem ekonomi dan sosial. Ini berarti bahwa pembangunan bukan saja melibatkan penambahan kepada pendapatan dan pengeluaran tetapi juga mempertimbangkan perubahan institusi sosial, struktur pentadbiran, pendapatan umum, adat istiadat dan kepercayaan.

Dari perspektif Islam tumpuan penting dari usaha pembangunan dan pergerakan utama kepada proses pembangunan adalah manusia. Setiap proses pembangunan harus bermula dengan moral, spritual, fisik dan perkembangan mental manusia yang akan menjadi agen kepada fisiknya sendiri dan lingkungan sosial ekonomi. Manusia adalah agen perubahan yang aktif dan bertanggung jawab menentukan kejayaan atau kegagalan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam proses pembangunan adalah multidimensi. Islam menekankan bahwa ruang operasi pembangunan adalah berkaitan dengan manusia, sifat-sifat manusia, insentif dan keinginan, sumber-sumber fisik, modal, kemahiran dan pendidikan.

Jadi dari perspektif Islam jika salah satu konsep pembangunan itu tidak betul, maka semua yang menyangkut konsep itu tidak akan betul. Ini adalah untuk menerangkan jika manusia sebagai agen pembangunan tidak menanamkan semangat yang mantap dan tidak mengamanahkan dirinya kepada moral yang baik dan nilai-nilai etika maka tidak ada jaminan dia akan bertanggung jawab kepada tuhanNya dan kepada masyarakat dalam usaha untuk mencapai tujuan pembangunan.

### **3. UNSUR POKOK DALAM PEMBANGUNAN**

Pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya; sering kali, kemajuan yang dimaksudkan terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi; bahkan dalam beberapa situasi yang sangat umum pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang diharapkan bagi 'sebagian orang tersingkir' dan sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya (Budiman, 1995).

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material; pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia bisa mengembangkan kreatifitas yang mereka miliki (Budiman, 1995).

Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara pada saat ini tidak akan dapat lepas dari pengaruh globalisasi yang melanda dunia. Persolan politik dan ekonomi tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai persoalan nasional. Keterkaitan antar negara menjadi persoalan yang patut untuk diperhitungkan. Masalah ekonomi atau politik yang dihadapi oleh satu negara membawa imbas bagi negara lainnya dan permasalahan tersebut akan berkembang menjadi masalah internasional (Sunyoto Usman, 2003).

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita mendefinisikan makna pembangunan secara hakikat bahwa pembangunan adalah proses multidimensional yang menyangkut reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Di samping untuk peningkatan suatu pendapatan dan output pembangunan menyangkut perubahan radikal dalam struktur kelembagaan, struktur sosial administrasi, perubahan sikap, adat serta kepercayaan ( Safi'i, 2008 ).

Bila kita melihat objek kajian teori. Teori struktural fungsional menjadi bahagian dari konsep pembangunan ini terlihat dari pembangunan dalam perspektif struktural, pembangunan bukan sebagai proses perubahan sosial yang berdiri sendiri, namun memiliki komponen yang berkaitan antara komponen yang ada didalam dan diluar. Jika di runut konteks teori perubahan sosial maka perubahan teori parson, merton dan marx dari teori konflik menyulut dalam teori kritis habermas dengan mzhab frankfurt. Pandangan struktural fungsional. ( Safi'i, 2008 )

#### **4. PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN**

Kartasasmita (1996), menyebutkan pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran.

Dalam proses pembangunan, masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai obyek, tetapi lebih sebagai subyek dan aktor atau pelaku (Soetomo,2008). Hoofsteede dalam Khairuddin (1992:125), membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan : pertama, Partisipasi inisiasi (inisation participation) adalah partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Kedua, Partisipasi legitimasi (legitimation participation) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau

pembuatan keputusan tentang proyek tersebut. ketiga, Partisipasi eksekusi (execution participation) adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

Ada dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, Pertama : perlu aspiratif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitif terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya. Kedua : pemerintah perlu melibatkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Suparjan menyebut alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut: Pertama, Adanya keterlibatan masyarakat memungkinkan mereka memiliki rasa tanggung jawab dan *handarbeni (sense of belonging)* terhadap keberlanjutan program pembangunan. Kedua, Dengan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan posisi tawar menawar harga sehingga daya tawarnya menjadi seimbang dengan pemerintah dan pihak pemilik modal. Ketiga, Dengan partisipasi masyarakat mampu mengontrol kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga terjadi sinergi antara sumber daya local, kekuatan politik pemerintah dan sumber daya modal dari investor luar.

Mengingat pentingnya partisipasi dalam pembangunan, maka menjadi mutlak bahwa segala hal yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan oleh pemerintah harus melibatkan masyarakat. Dalam proses pembangunan, masyarakat hendaknya tidak sekedar diposisikan sebagai obyek dari pembangunan tetapi sebaliknya masyarakat hendaknya dijadikan subyek dalam menentukan arah perkembangannya. Dengan demikian, apabila ada warga masyarakat yang melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah dan penolakan itu dilakukan oleh mayoritas, maka pemerintah tidak boleh memaksakan kehendaknya, yakni dengan tetap menjalankan kebijakannya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kebutuhan dasar seperti halnya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi (Sumardi dan Evers, 1982). FAO (1991) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah hak azasi, sehingga masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Kesempatan tersebut perlu diberikan karena tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan yang mereka inginkan.

Masyarakat sendiri yang akan merasakan dan menilai apakah pembangunan tersebut berhasil atau tidak. Maka agar tujuan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah, diperlukan persepsi yang sama antar individu yang terlibat dalam

pembangunan. Persamaan persepsi diperlukan mulai dari apa yang harus ditempuh, bagaimana implementasinya, monitoring dan evaluasi. Akhirnya pendekatan partisipatif disadari mutlak diperlukan dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, telah terbit berbagai buku pedoman untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

## 5. KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sangat diperlukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang akan menikmati hasil pembangunan tersebut. Pemahaman yang benar mengenai konsep partisipasi dari warga masyarakat maupun birokrat dalam melibatkan masyarakat pada akhirnya menjadi *entry poin* dalam setiap proses pembangunan. Realitas yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa konsep partisipatif masih diartikan secara salah kaprah. Seakan akan memang harus mendukung program pemerintah secara gratis karena program tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan dari pendekatan partisipatif dalam pembangunan adalah berkembangnya kreatifitas yang berorientasi pada kompetensi dan tanggung jawab sosial anggota masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses maka keterampilan menganalisis dan perencanaan menjadi teralihkan kepada mereka. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka menjadi mutlak segala hal yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan ekonomi hendaklah melibatkan masyarakat. Pendekatan partisipatif sebenarnya muncul sebagai upaya mengatasi kelemahan-kelemahan dari pendekatan sentralistik. Pendekatan partisipatif menghendaki adanya sebuah pendekatan yang berbasis pada masyarakat bawah, pengakuan atas keanekaragaman lokal dan mengutamakan proses belajar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antjok, Jamaluddin. 1995. *Pemanfaatan organisasi lokal untuk mengentaskan kemiskinan – dalam kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Adytia Media.
- Budiman, Arief . 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dalle Daniel Sulekale, 2008. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah*, <http://www.ekonomirakyat.org>
- Dani Saleh dan Abdul Rahman Aziz, 2003. *Azas Kefahaman Pengurusan Pembangunan*. Sintok. Universiti Utara Malaysia.
- Ericson, Eugen C Consequences Left Ledership and Partisipation dalam Whiting R Larry (ed) 1974. *Communities Left Behind, alternative for development North Central Regional Center rural Development*, The Lowa State University Press.
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek; Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Maimunah Ismail. 1986. *Pengembangan Implikasi ke atas pembangunan Masyarakat*. Kuala Lumpur. Jabatan Penerangan Malaysia.
- Safi'i, 2008, *Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Avtroes Prees.
- Selo Sumarjan. 1977. Kemiskinan: Suatu Pandangan Sosiologi, *Jurnal Sosiologi Indonesia*. No. 2-1977, Ikatan Sosiologi Indonesia.
- Soekidjo, Notoatmodjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soeyoto Usman. 1998. *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Suparjan, Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat; Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Merdeka.
- Starhm, Rudolf H. 1995. *Kemiskinan Dunia Ketiga Menelaah kegagalan Pembangunan di Negara berkembang*. Jakarta: CIDES.



universitas  
MALIKUSSALEH

Kampus Bukit Indah Jln. Sumatera No. 9B  
Kecamatan Muara SatKota Lhokseumawe  
Email : [Info@unimal.ac.id](mailto:Info@unimal.ac.id)  
Homepage <http://www.unimal.ac.id>

